

LAMPIRAN III  
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN  
PERUMAHAN RAKYAT  
NOMOR 25/PRT/M/2018  
TENTANG  
TATA CARA PENGGUNAAN DANA BADAN USAHA  
TERLEBIH DAHULU UNTUK PENGADAAN TANAH  
BAGI PEMBANGUNAN JARINGAN IRIGASI

(KOP)	
BERITA ACARA PENYERAHAN HASIL PENGADAAN TANAH	
Nomor ..... (1)	
Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ... (2) bertempat di ..... (3) , kami yang bertandatangan di bawah ini:	
1. Nama	: .....(4)
NIP	: .....(5)
Jabatan	: .....(6)
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;	
2. Nama	: .....(7)
NIP	: .....(8)
Jabatan	: .....(9)
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.	
PIHAK PERTAMA dengan ini menyerahkan hasil pengadaan tanah untuk pembangunan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi .... (10) berupa . . . . (11) bidang tanah dan dokumen hasil pengadaan tanah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Berita Acara ini kepada PIHAK KEDUA dalam rangka pengembalian dana pengadaan tanah Badan Usaha . . . . (12).	
Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Berita Acara ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.	
PIHAK KEDUA,	PIHAK PERTAMA,
..... (13)	..... (14)

Petunjuk pengisian:

- (1) Diisi nomor Berita Acara Serah Terima.
- (2) Diisi tanggal, bulan, dan tahun penandatanganan Berita Acara Serah Terima.
- (3) Diisi dengan nama kota/kabupaten penandatanganan Berita Acara Serah Terima.
- (4) Diisi dengan nama lengkap Kepala Satker.
- (5) Diisi dengan Nomor Induk Pegawai Kepala Satker.
- (6) Diisi dengan jabatan lengkap.
- (7) Diisi dengan nama lengkap pimpinan atau pejabat yang mendapat pendelegasian kewenangan pada LMAN.
- (8) Diisi dengan pimpinan atau pejabat yang mendapat pendelegasian kewenangan pada LMAN.
- (9) Diisi dengan jabatan lengkap pimpinan atau pejabat yang mendapat pendelegasian kewenangan pada LMAN.
- (10) Diisi dengan nama daerah irigasi.
- (11) Diisi dengan jumlah bidang tanah hasil pengadaan tanah yang diserahkan.
- (12) Diisi nama/identitas Badan Usaha yang dananya digunakan terlebih dahulu untuk pengadaan tanah.
- (13) Diisi dengan nama lengkap dan Nomor Induk Pegawai pimpinan LMAN atau pejabat yang mendapat pendelegasian kewenangan pada LMAN.
- (14) Diisi dengan nama lengkap dan Nomor Induk Pegawai Kepala Satker.

MENTERI PEKERJAAN UMUM  
DAN PERUMAHAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

M. BASUKI HADIMULJONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN  
PERUMAHAN RAKYAT



Putranta Setyanugraha, SH. MSi.  
NIP. 196212251993011001

JDIH Kementerian PUPR